



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program
Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 1853/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/V/2023

Identifikasi Faktor-Faktor Idiosinkratik Joko Widodo
dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kasus
Pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna (2016-2022)

Skripsi

Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Oleh

Kezia Kirana

6092001036

Bandung

2024



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program
Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 1853/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/V/2023

Identifikasi Faktor-Faktor Idiosinkratik Joko Widodo
dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kasus
Pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna (2016-2022)

Skripsi

Oleh

Kezia Kirana

6092001036

Pembimbing

Sapta Dwikardana, Ph.D.

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

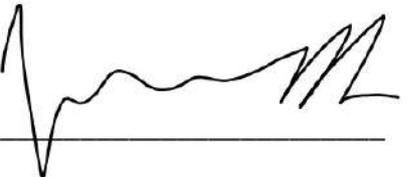


Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Kezia Kirana
Nomor Pokok : 6092001036
Judul : Identifikasi Faktor-Faktor Idiosinkratik Joko Widodo dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kasus Pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna (2016-2022)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 18 Januari 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.



Sekretaris
Sapta Dwikardana, Ph.D.



Anggota
Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si.



Mengesahkan,
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M.

DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Kezia Kirana
Nomor Pokok Mahasiswa : 6092001036
Program Studi : Hubungan Internasional
Pembimbing : Sapta Dwikardana, Ph.D. (20080009) Pembimbing Tunggal
Hari dan tanggal ujian skripsi : Kamis tanggal 18 January 2024
Judul (Bahasa Indonesia) : Identifikasi Faktor-Faktor Idiosinkratik Joko Widodo dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kasus Pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna (2016-2022)
Judul (Bahasa Inggris) : Identification of Joko Widodo's Idiosyncratic Factors in Indonesia Foreign Policy: The Case of China Violations in the Natuna Sea (2016-2022)

1. Perbaiki Judul Skripsi menjadi (**Judul harus ditulis lengkap menggunakan huruf besar kecil/Title Case**)

Judul (Bahasa Indonesia)

Judul (Bahasa Inggris)

2. Perbaiki Umum (meliputi : cara merujuk, daftar pustaka, teknis editing) :
Sesuai dengan catatan.

3. Perbaiki di Bab 1

4. Perbaiki di Bab 2

5. Perbaiki di Bab 3

6. Perbaiki di Bab 4

7. Perbaiki di Bab 5

DOKUMEN INI TIDAK PERLU DITANDATANGANI LAGI

Bandung, 18 January 2024

Ketua Program Studi,

kaprodi_hi.fisip@unpar.ac.id
1/18/2024 11:24:21

Marshell Adi Putra, S.IP., MA.

Penguji,

adri@unpar.ac.id
1/18/2024 11:11:11

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Penguji (Pembimbing),

sapta@unpar.ac.id
1/18/2024 11:11:23

Sapta Dwikardana, Ph.D.

Penguji,

vrameswariomega@unpar.ac.id
1/18/2024 11:11:44

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han)

Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Kezia Kirana

NPM : 6092001036

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Identifikasi Faktor-Faktor Idiosinkratik Joko Widodo dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kasus Pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna (2016-2022)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 3 Januari 2024



Kezia Kirana

ABSTRAK

Nama : Kezia Kirana
NPM : 6092001026
Judul : Identifikasi Faktor-Faktor Idiosinkratik Joko Widodo dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kasus Pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna (2016-2022)

Kepribadian yang dimiliki oleh pemimpin negara berimplikasi pada pengambilan keputusan suatu negara. Sama halnya dengan masa kepemimpinan Joko Widodo, faktor kepribadian menjadi salah satu alasan dibalik pengambilan keputusan di Laut Natuna. Pada awalnya, Indonesia tidak terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Namun pada tahun 2010, kebijakan Tiongkok terkait Nine Dash Line membawa Indonesia terlibat ke dalam sengketa Laut Natuna. Meskipun UNCLOS 1982 menetapkan Natuna sebagai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Tiongkok tetap mengabaikan dan melakukan pelanggaran di Laut Natuna. Indonesia kemudian menanggapi hal tersebut dengan membentuk nota protes, perubahan peta, kerjasama dengan negara lain, melakukan rapat, kunjungan, dan bahkan sampai meningkatkan pertahanan. Pada aspek lain, Indonesia dan Tiongkok memiliki kedekatan dalam bidang ekonomi. Menimbang kedekatan yang dimiliki, Indonesia seharusnya tidak berlaku agresif dan memberikan keringanan perihal pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna. Maka dari itu, fenomena ini memunculkan pertanyaan penelitian “Bagaimana faktor-faktor idiosinkratik Joko Widodo berimplikasi dalam proses formulasi kebijakan luar negeri Indonesia di Laut Natuna?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kepribadian dari Joko Widodo yang menyebabkan terbentuknya kebijakan luar negeri Indonesia di Laut Natuna. Penulis menggunakan metode penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data berupa studi pustaka dan perhitungan kuesioner. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan metode *The Big Five Personality Traits*, yaitu neuroticism, agreeableness, conscientiousness, openness to experience, dan extraversion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang, citra, dan kepribadian neuroticism, yaitu tingkat sentimen tinggi yang dimiliki dapat mempengaruhi cara pandang dan pola pikirnya sebagai seorang presiden.

Kata Kunci: Idiosinkratik, Joko Widodo, Laut Natuna, *The Big Five Personality Traits*.

ABSTRACT

Name : Kezia Kirana
Student Number : 6092001026
Judul : Identification of Joko Widodo's Idiosyncratic Factors in Indonesia Foreign Policy: The Case of China Violations in the Natuna Sea (2016-2022)

The personality of a national leader significantly influences a country's decision making process. Similar to Joko Widodo's leadership era, personality factors play a pivotal role behind decision-making in the Natuna Sea. Initially, Indonesia remained uninvolved in the South China Sea conflict, but in 2010, China's Nine Dash Line policy drew Indonesia into the Natuna Sea dispute. Despite UNCLOS 1982 designating Natuna as part of Indonesia's Exclusive Economic Zone, China persisted in disregarding this and committed violations in the Natuna Sea. Indonesia responded by issuing protest notes, altering maps, engaging in meetings, visits, and even enhancing defense measures. On another note, Indonesia and China share economic ties. Considering this closeness, Indonesia should have exhibited restraint and a more lenient approach regarding China's violations in the Natuna Sea. Consequently, this phenomenon raises the research question, "How do Joko Widodo's idiosyncratic factors impacted the formulation of Indonesia's foreign policy in the Natuna Sea?" The research aims to identify the personality traits of Joko Widodo contributing to the development of Indonesia's foreign policy in the Natuna Sea. The author employs a mixed-method approach, combining qualitative and quantitative methods with data collection through literature reviews and questionnaire analysis. In the analysis, the researcher used The Big Five Personality Traits method, encompassing neuroticism, agreeableness, conscientiousness, openness to experience, and extraversion. The findings indicate that background, image, and neuroticism personality, characterized by a high level of sentiment, can influence president's perspectives and thought patterns.

Keywords: *Idiosyncratic, Joko Widodo, Natuna Sea, The Big Five Personality Traits.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas kasih dan penyertaanNya sehingga penelitian berjudul “Identifikasi Faktor-Faktor Idiosinkratik Joko Widodo dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kasus Pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna (2016-2022)” dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir jenjang Sarjana Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai pengaruh faktor-faktor kepribadian Joko Widodo sebagai salah satu aktor yang berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Indonesia di Laut Natuna. Penulis menggunakan teori *The Big Five Personality Traits* dalam menganalisis kepribadian dari Joko Widodo terhadap kebijakan-kebijakannya di Laut Natuna.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dalam menerima kritik maupun saran agar penelitian ini dapat menjadi penelitian yang lebih baik lagi. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca maupun pihak-pihak yang sedang merancang penelitian dengan topik serupa. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan Ilmu Hubungan Internasional.

Bandung, 6 Desember 2023,

Kezia Kirana

UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini berhasil disusun berkat kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus ingin mendedikasikan halaman ini sebagai ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta di dalam penyelesaian skripsi dan untuk setiap pihak yang berjasa di dalam perkuliahan penulis.

Kepada Tuhan Yesus,

Atas rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Kepada Keluarga,

Atas segala dukungan, baik dukungan secara mental maupun secara finansial. Terima kasih telah mendukung hingga akhir dan bangga dalam situasi apapun.

Kepada Mas Sapta selaku Dosen Pembimbing,

Atas bimbingan, arahan, dan masukan dalam proses pembuatan skripsi. Terima kasih telah selalu sabar dalam menjelaskan sesuatu di saat saya kebingungan. Semoga Mas Sapta selalu diberikan kesehatan.

Kepada Theresa Aurel,

Terima kasih telah menjadi teman yang sangat baik bagi saya dan telah mewarnai kehidupan saya di masa perkuliahan. Terima kasih untuk selalu ada di kala suka dan duka serta menjadi kenangan baik semasa di Bandung. Terima kasih telah memahami dan mendukung saya dalam setiap situasi. Terima kasih telah menjadi teman yang sangat sabar dan tulus dalam pertemanan. Atas segalanya, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu sukses di kehidupan mendatang.

Kepada Internal,

Terima kasih kepada Orva, Jeni, Abing, Celen, Randi, Kezi, Koko dan Mamet yang telah membentuk pengalaman pertemanan yang tak terlupakan bagi

saya. Terima kasih telah bersedia mendengar keluh kesah saya selama perkuliahan. Terima kasih telah menjadi rumah yang nyaman bagi saya untuk bercerita tentang apapun dan selalu menjadi pendengar yang baik. Terima kasih atas setiap candaan yang dilontarkan sehingga kehidupan di Bandung terasa lebih mudah untuk dijalani. Terima kasih selalu hadir di dalam setiap aspek kehidupan saya. Tak terhitung berapa banyak bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada saya. Saya selalu bersyukur dan berterimakasih kepada Tuhan telah dipertemukan dengan teman-teman yang sangat memahami dan menyayangi saya dengan sepenuh hati. Terima kasih atas segala kenangannya. Semoga pertemanan ini akan berlanjut hingga kapanpun.

Kepada Codey Erwan,

Terima kasih telah memberikan berbagai fakta yang menyadarkan dan membuka mata saya selama penyusunan skripsi. Terima kasih telah memotivasi saya untuk terus melanjutkan skripsi sehingga berhasil mengumpulkannya dengan tepat waktu. Semoga selalu diberkati dan berhasil mendapatkan pasangan yang selalu didoakan.

Kepada Warta Himahi Divisi Graphic Design,

Terima kasih kepada Ardel, Sevinka, Joce, Kezreg, dan Rahel telah mendukung dan memberikan pengalaman berharga bagi saya. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan dan segala bantuan di dunia desain. Doa terbaik untuk kalian semua.

Yang Terakhir, Kepada Diri Sendiri,

Terima kasih telah yakin dan tidak berhenti untuk mencoba.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	10
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	10
1.2.3 Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4. Kajian Literatur	12
1.5. Kerangka Pemikiran	17
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	22
1.6.1. Metode Penelitian	22
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	23
1.7. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	27
KONDISI KONFLIK DI LAUT TIONGKOK SELATAN DAN BIOGRAFI JOKO WIDODO SEBAGAI PEMIMPIN DI INDONESIA.....	27
2.1 Sejarah Konflik Laut Tiongkok Selatan	27
2.1.1 ASEAN di dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan	34
2.2 Joko Widodo sebagai Pemimpin di Indonesia	37
2.2.1 Profil Joko Widodo	37
2.2.2 Perjalanan Karir Politik	43

2.2.3 Citra Politik	48
2.3 Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Laut Natuna	50
BAB III.....	56
KETERKAITAN FAKTOR IDIOSINKRATIK JOKO WIDODO DENGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI LAUT NATUNA	56
3.1 Analisis Idiosinkratik Joko Widodo menggunakan <i>The Big Five Personality Traits</i>.....	56
3.1.1 Kepribadian Utama: <i>Neuroticism</i>	56
3.1.2 Kepribadian Kedua: <i>Agreeableness</i>	64
3.1.3 Kepribadian Ketiga: <i>Conscientiousness</i>	72
3.1.4 Kepribadian Keempat: <i>Openness to Experience</i>	83
3.1.5 Kepribadian Kelima: <i>Extraversion</i>	95
3.2 Hubungan Idiosinkratik Joko Widodo dengan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Laut Natuna	101
3.2.1 <i>Neuroticism</i> dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Laut Natuna	102
3.2.2 <i>Agreeableness</i> dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Laut Natuna.....	107
3.2.3 <i>Conscientiousness</i> dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Laut Natuna.....	110
3.2.4 <i>Openness to Experience</i> dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Laut Natuna.....	112
3.2.5 <i>Extraversion</i> dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Laut Natuna	113
BAB IV	117
KESIMPULAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	137

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3 Daftar Pelanggaran Kedaulatan oleh Tiongkok di Natuna.....	51
Tabel 3.1.1 Skor <i>Neuroticism</i> Joko Widodo	59
Tabel 3.1.2 Skor <i>Agreeableness</i> Joko Widodo	67
Tabel 3.1.3 Skor <i>Consciousness</i> Joko Widodo	75
Tabel 3.1.4 Skor <i>Openness to Experience</i> Joko Widodo	86
Tabel 3.1.5 Skor <i>Extraversion</i> Joko Widodo	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kebijakan <i>Nine Dash Line</i> yang dibentuk oleh Tiongkok melintasi wilayah Laut Natuna	5
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner <i>The Big Five Personality Traits</i>	137
Lampiran 2. Penilaian Kuesioner <i>The Big Five Personality Traits</i>	138
Lampiran 3. Lembar Konversi Skor.....	139
Lampiran 4. Lembar Interpretasi.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam studi Hubungan Internasional, terdapat beberapa faktor yang menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah kepribadian pemimpin atau presiden di negara tersebut. Sama halnya dengan setiap manusia, presiden juga memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Perbedaan perilaku masing-masing presiden dapat terlihat dari tindakan yang diambil, gaya kepemimpinan, pola pikir, dan minat suatu presiden ketika menetapkan arah pemerintahannya.¹

Kepemimpinan presiden yang berbeda akan menghasilkan *output* yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari kasus pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Pemindahan tersebut terjadi karena adanya keputusan dari Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat. Donald Trump sebagai satu-satunya presiden yang secara langsung berani untuk melakukan langkah pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Sedangkan presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya hanya sekedar berjanji dan tidak ada aksi nyata dalam memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem.²

Keputusan yang ditetapkan oleh Donald Trump dipengaruhi oleh kepribadian di dalam dirinya. Donald Trump memiliki sifat yang ambisius, ingin

¹ Martha L Cottam, Elena Mastors, Thomas Preston, dan Beth Dietz-Uhler, *Introduction to Political Psychology*, New York: Routledge, 2016.

² Geoffrey Aronson, "Policy Options in a Time of Transition: The US and the Israel-Palestine Conflict," *Middle East Journal* 67, no. 2 (2013): 249–56, <http://www.jstor.org/stable/43698048>.

memperlihatkan kekuasaannya kepada dunia, kompetitif, keras kepala, dan adanya sikap nasionalis yang tinggi.³ Kepribadian tersebut yang pada akhirnya mendorong keputusan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem.

Kasus lainnya dapat terlihat dari keputusan George W. Bush selaku Presiden Amerika Serikat dalam kebijakan *War on Terrorism*. *War on Terrorism* adalah tindakan militer yang dilakukan Amerika Serikat dalam menangkap dan membunuh para pelaku serangan terorisme 11 September 2001.⁴ Keputusan yang dijalankan Amerika Serikat didasari kepribadian dari George W. Bush, dimana ia memiliki kepribadian yang *paranoid* dan *obsessive-compulsive*.⁵ Ia sangat menginginkan Amerika Serikat terbebas dari terorisme sehingga ia akan melakukan segala cara agar dapat memberantas terorisme meskipun keputusan tersebut adalah keputusan yang beresiko.

Selain dari fenomena keputusan George W. Bush dalam *War on Terrorism* dan keputusan Donald Trump dalam pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem, di Indonesia sendiri juga mengalami hal serupa dimana kepribadian presiden sebagai faktor yang berimplikasi terhadap pengambilan keputusan. Setiap presiden di Indonesia memiliki kepribadian yang berbeda dan pada masa kepemimpinan Joko Widodo, adanya penerapan yang berbeda ketika menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Tiongkok di Laut Natuna. Menurut

³ M. G. Ciot, "Idiosyncrasies in Trump's Foreign Policy Decision Making," *Analele Universității din Oradea Relații Internationale și Studii Europene (RISE)*, 8, pp.43–60 (2016), <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=519484>.

⁴ Rafał Kuś, "Our Grief and Anger': George W. Bush's Rhetoric in the Aftermath of 9/11 as Presidential Crisis Communication., *Res Rhetorica* 7, no 1 (2020): 45–60. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=846730>.

⁵ Ibid.

data dari Biro Hidrografis Internasional, Laut Tiongkok Selatan adalah perairan yang memiliki luas sekitar 4.000.000 kilometer persegi dan memanjang dari barat daya ke timur laut.⁶ Secara geografis, Laut Tiongkok Selatan pada bagian selatan berbatasan dengan Sumatera dan Kalimantan serta pada bagian utara berbatasan dengan Selat Taiwan dan ujung utara Taiwan.⁷

Laut Tiongkok Selatan memiliki sejarah yang panjang, baik pada permasalahan penamaan maupun pada konflik saling klaim atas wilayah tersebut. Penamaan Laut Tiongkok Selatan muncul pada abad ke-16 dimana bangsa Eropa sering menggunakan rute tersebut sebagai rute pelayaran dari Eropa menuju Tiongkok. Pelayar Eropa pada awalnya menggunakan sebutan Laut Tiongkok untuk menamai wilayah tersebut.⁸ Namun, sebutan tersebut diubah menjadi Laut Tiongkok Selatan untuk membedakan laut tersebut dengan laut-laut lain yang berada di sekitarnya.⁹

Ketika berbicara mengenai Laut Tiongkok Selatan tentunya tidak terlepas dari Tiongkok yang merupakan salah satu negara berpengaruh dalam persengketaan. Pada tahun 1947, Tiongkok membentuk *Eleven Dash Line* yang kemudian diubah menjadi *Nine Dash Line* atau sembilan garis imajiner. Ketentuan tersebut menjadi justifikasi bahwa Tiongkok mempunyai wewenang secara penuh atas kawasan Laut Natuna sehingga pada tahun 2010, Indonesia terseret ke dalam konflik Laut Tiongkok Selatan.

⁶ Rizal Sukma dan Asnani Usman, "Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi Asean," *Indonesia: Centre for Strategic and International Studies*, (1997).

⁷ Ibid.

⁸ (IHO), International Hydrographic Organization, "Limits of Oceans and Seas," Special Publication, PANGAEA, Januari 1, 1970, <https://epic.awi.de/id/eprint/29772/>.

⁹ Ibid.

Nine Dash Line yang dibentuk Tiongkok didasarkan atas sejarah Tiongkok Kuno yang menyatakan bahwa Laut Natuna pertama kali ditemukan oleh Dinasti Han serta Tiongkok sebagai negara pertama yang memasukkan Laut Natuna ke dalam peta teritori wilayah negaranya. Tiongkok juga menyatakan adanya bukti-bukti arkeologis Tiongkok yang tampak sehingga persamaan identitas yang menjadi salah satu dasar alasan Tiongkok ingin menguasai wilayah Laut Natuna.¹⁰

Selain dari faktor persamaan identitas, adanya faktor lain yang menyebabkan Tiongkok bersikeras untuk klaim secara penuh wilayah Laut Natuna. Faktor tersebut adalah faktor geografis dan kekayaan alam yang terdapat di Laut Natuna. Laut Natuna memiliki posisi yang strategis, yaitu wilayahnya yang menjadi jalur perlintasan perdagangan. Adanya tanker-tanker minyak dari Timur Tengah yang melintasi serta sebagai jalur utama pengangkut barang-barang mentah menjadi bukti bahwa Laut Natuna adalah wilayah yang strategis.¹¹

Wilayah Laut Natuna juga kaya akan sumber daya alam dimana hal ini dibuktikan dari penelitian *The Committee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas* yang menyatakan bahwa sejak tahun 1960-an, telah ditemukannya minyak dan gas yang berlimpah dan sumber daya alam tersebut diperkirakan mencapai 1,4 sampai 1,9 juta barrel per hari.¹² Kekayaan alam Laut Natuna juga dapat terlihat dari banyaknya variasi ikan yang terdapat di

¹⁰ Setyasih Harini, "Kepentingan Nasional China dalam Konflik Laut Cina Selatan," *Transformasi* 14, no.21, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/214>.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

laut tersebut. Letaknya yang berdekatan dengan selat berpotensi bagi ikan-ikan yang ada bermigrasi dari satu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ke ZEE lain.¹³

Kondisi posisi Laut Tiongkok Selatan yang strategis serta kekayaan alamnya yang berlimpah menyebabkan negara-negara di sekitarnya seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina serta Taiwan saling klaim atas wilayah tersebut.¹⁴ Indonesia sebagai negara yang berbatasan dengan Laut Natuna juga ikut terlibat di dalam konflik persengketaan. Namun, tendensi konflik Indonesia lebih ditunjukkan kepada Tiongkok karena Tiongkok yang secara gencar melakukan ekspansi wilayah dan pihak Tiongkok juga melakukan klaim semata melalui ketentuan *Nine Dash Line*.

Nine Dash Line di Laut Natuna



Gambar 1.1 Kebijakan Nine Dash Line yang dibentuk oleh Tiongkok melintasi wilayah Laut Natuna

Sumber: CNN.com

¹³ Ibid.

¹⁴ Jihyun Kim, "Territorial Disputes in the South China Sea: Implications for Security in Asia and Beyond," *Strategic Studies Quarterly* 9, no. 2 (2015): 107–41, <http://www.jstor.org/stable/26271078>.

Klaim Tiongkok atas Laut Natuna mengusik kedaulatan Indonesia dimana pihak Tiongkok mengutus banyak kapal penjaga untuk menetap dan melintasi wilayah Laut Natuna. *Nine Dash Line* yang dibentuk Tiongkok juga tidak memiliki dasar hukum yang sah dan hanya berlandaskan faktor historis dari Tiongkok Kuno. Padahal dalam UNCLOS 1982 tercatat bahwa Laut Natuna adalah ZEE Indonesia sehingga secara hukum, wilayah Laut Natuna seharusnya menjadi wilayah milik Indonesia.¹⁵

Hal ini ditentukan berdasarkan dokumen *The United Nations Convention on the Law of the Sea a Historical Perspective* yang memuat tentang pembagian wilayah laut. Adanya 3 bagian wilayah laut, yaitu laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen. Laut teritorial adalah perairan selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan. Negara pemegang hak laut teritorial memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut dan dasar laut. Wilayah laut yang kedua, yaitu ZEE adalah perairan selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan. Negara pemegang hak ZEE dapat dengan bebas menggunakan sumber daya alam di zona tersebut. Namun, perairan ZEE tetap menjadi laut internasional yang dapat dilalui oleh seluruh negara tanpa memerlukan izin dari negara pantai. Wilayah laut yang ketiga adalah landas kontinen yang merupakan benua yang terendam air laut.¹⁶

Pemahaman tersebut yang menjadi dasar Indonesia memiliki hak atas Laut Natuna. Setelah ditarik 200 mil dari garis pangkal kepulauan, Laut Natuna seharusnya menjadi wilayah ZEE milik Indonesia dan Indonesia yang memiliki

¹⁵ Enno Haya dan Labib Muttaqin, "Analysing the Settlement of Maritime Sovereignty's Dispute Cases based on UNCLOS 1982," *Interdisciplinary Social Studies* 1, no.5, 2022.

¹⁶ United Nations, 1982, "United Nations Convention on the Law of the Sea," United Nations, https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

kedaulatan secara penuh atas sumber daya yang ada di Laut Natuna. Berkaca dari ketentuan UNCLOS, kekayaan alam yang terkandung di dalam ZEE diberikan kepada negara pantai dan Indonesia telah diakui sebagai negara pantai oleh UNCLOS. Namun, Tiongkok tetap mengabaikan hal tersebut dan tetap berpegang teguh pada *Nine Dash Line* yang dibentuk pemerintah Tiongkok.

Klaim Tiongkok atas ZEE Indonesia mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan kepada Indonesia. Hal ini dikarenakan klaim Tiongkok di Laut Natuna menyebabkan hilangnya perairan Indonesia dengan luas sekitar 83.000 km persegi atau sebanyak 30 persen dari luas laut Indonesia di Laut Natuna.¹⁷ Dengan adanya wilayah laut yang diklaim Tiongkok menyebabkan banyak nelayan Tiongkok bebas menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia. Puncaknya terjadi pada Maret 2016, dimana banyak aktivitas dari Tiongkok yang mengganggu perairan Indonesia, yaitu dimulai dari adanya kapal milik Tiongkok yang menghalangi kapal milik Indonesia ketika sedang menangkap ikan.¹⁸ Tidak hanya itu, kapal milik Tiongkok juga menggiring kapal ilegal dari negaranya untuk melakukan *illegal fishing* di ZEE me

1.2. Identifikasi Masalah

Fokus capaian dari pemerintahan Joko Widodo adalah membangun infrastruktur di dalam negeri. Dalam proses pembangunan tersebut pastinya

¹⁷ Darmayadi, Andrias, dan Ervina Nabilah Purnamasari, "The Indonesia – China Relations in the Natuna Sea Dispute Resolution: Struggle for Sovereignty," *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)* 9, no. 1, (2022): 41–48. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i1.870>.

¹⁸ Sulistyani, Yuli Ari, Andhini Citra Pertiwi, and Marina Ika Sari, 2021, "Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration [Respons Indonesia Di Tengah Dinamika Sengketa Laut China Selatan Di Bawah Pemerintahan Jokowi.]" *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 12, no.1, (2021): 85–103. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>.

membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada tahun 2015-2019 Indonesia membutuhkan sekitar US\$ 450 miliar untuk investasi pada bidang ekonomi.¹⁹ Akan tetapi, Indonesia hanya mampu menyediakan sepertiga dari jumlah tersebut.

Motif Joko Widodo di dalam memajukan infrastruktur negara yang menjadi pemicu kedekatan antara Indonesia dan Tiongkok dalam bidang ekonomi. Indonesia menjalin kerjasama dengan Tiongkok karena Tiongkok menawarkan solusi pembangunan yang murah dan cepat kepada Indonesia. Selain sebagai investor, Tiongkok juga merupakan mitra dagang terbesar di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari data Badan Pusat Statistik per 2020 yang menyatakan bahwa nilai perdagangan Tiongkok dan Indonesia mencapai sekitar US\$ 84,8 miliar.²⁰ Nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok diperkirakan sebesar US\$ 27,8 miliar dan nilai impor Tiongkok ke Indonesia sebesar US\$ 45,9 miliar.²¹

Selain itu, peran Jokowi dalam kaitannya dengan Laut Tiongkok Selatan cenderung lebih bersifat diplomatis. Pemerintah Indonesia telah mendorong penyelesaian sengketa maritim di wilayah tersebut melalui dialog dan pendekatan multilateral. Jokowi dan pemerintah Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan. Indonesia juga berupaya untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara-

¹⁹ Mangadar Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 11, no. 1, (2015), <https://doi.org/10.26593/jihi.v11i1.1442.%p>.

²⁰ *Badan Pusat Statistik*, diakses pada tanggal 4 Mei 2025, <https://www.bps.go.id/publication/2021/06/10/2f4516969cc6fa220892f170/statistik-perdagangan-luar-negeri-impor-2020-jilid-i.html>.

²¹ *Ibid.*

negara yang terlibat dalam sengketa tersebut melalui mekanisme seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

Maka dari itu, hubungan kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia serta Indonesia yang pada awalnya menekankan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan seharusnya menjadi kompromi bagi Indonesia untuk tidak mengambil langkah tegas kepada pelanggaran yang dilakukan Tiongkok di Laut Natuna. Namun, respon Joko Widodo sebagai presiden Indonesia adalah Indonesia tidak lagi memiliki posisi yang netral di Laut Natuna, tetapi berubah kondisi menjadi berlawanan dengan Tiongkok. Adanya langkah strategis yang dilakukan Indonesia dalam upaya merebut kembali kedaulatan yang seharusnya menjadi milik Indonesia. Langkah-langkah tersebut seperti meningkatkan sektor keamanan di kawasan Laut Natuna dan mengesahkan peta baru wilayah Indonesia yang menunjukkan adanya perubahan sebutan Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna.²²

Selain itu, Indonesia juga tercatat beberapa kali telah mengirimkan nota protes ke Tiongkok. Joko Widodo juga melakukan kunjungan secara langsung ke Natuna dan adanya pemberian sertifikat lahan kepada 102 warga Natuna sebagai upaya Indonesia dalam memperkuat posisi.²³ Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui persetujuan dari Joko Widodo selaku presiden Indonesia. Berdasarkan data-data tersebut, Indonesia seharusnya mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan keputusan Tiongkok, tetapi berbeda dengan seharusnya terjadi, Joko

²² Leo Suryadinata, "What Does Indonesia's Renaming of Part of the South China Sea Signify?" (2017), https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_64.pdf.

²³ Ibid.

Widodo tetap mengambil menjalankan aksi-aksi tegas meskipun Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia.

1.2.1 Deskripsi Masalah

Melalui pemaparan yang telah disampaikan, maka masalah di dalam penelitian adalah Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan dekat di dalam bidang ekonomi. Tiongkok merupakan mitra kerjasama Indonesia dan sebagai investor asing terbesar di Indonesia. Kedekatan kedua negara tersebut dan adanya fokus yang ingin dicapai oleh Indonesia membuat Indonesia seharusnya tidak berlaku agresif ke Tiongkok dan memberikan keringanan kepada Tiongkok perihal pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna. Namun pada kenyataannya, Indonesia tetap meningkatkan agresi konflik dengan Tiongkok di Laut Natuna.

Penelitian mengasumsikan bahwa perilaku dari suatu pemimpin negara memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji faktor-faktor idiosinkratik Joko Widodo sebagai faktor yang menyebabkan Indonesia tetap mengambil langkah tegas meskipun Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Peneliti akan melakukan pembatasan dari sisi isu, aktor, dan waktu untuk menghasilkan analisis yang kritis dan dapat menjawab pertanyaan penelitian secara tepat dan komprehensif. Penulis akan berfokus pada isu pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna dan kepribadian dari Joko Widodo sebagai faktor yang berimplikasi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Pada aktor, peneliti akan menekankan

pada aktor individu, yaitu Joko Widodo sebagai aktor yang berperan penting di dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan waktu, permasalahan ini akan dibatasi pada persengketaan Laut Natuna pada masa kepemimpinan Joko Widodo, yaitu pada tahun 2016-2022. Tahun tersebut dipilih karena 2016 merupakan awal momentum Indonesia bersitegang dengan Tiongkok.²⁴ Pada tahun tersebut, banyak aktivitas Tiongkok yang memicu konflik sehingga Indonesia banyak menunjukkan sisi agresif pada bulan Maret, Mei, dan Juni 2016. Sedangkan pembatasan pada tahun 2022 dikarenakan Presiden Joko Widodo secara resmi membentuk Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 yang menyatakan adanya pembagian zona perairan Natuna dan wilayah tersebut akan digunakan sebagai kawasan perikanan, pariwisata, pertahanan, dan keamanan.²⁵

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana faktor-faktor idiosinkratik Joko Widodo berimplikasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia di Laut Natuna?”**

²⁴ Ibid.

²⁵ Peraturan BPK, *PERPRES No. 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara [JDIH BPK RI]*, diakses pada 4 Mei 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/206049/perpres-no-41-tahun-2022#:~:text=PERPRES%20No.%2041%20Tahun%202022>.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemimpin negara dengan keputusan yang akan dihasilkannya. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui alasan di balik pengambilan keputusan di Laut Natuna yang disebabkan oleh faktor kepribadian dari Joko Widodo. Penelitian ini berusaha untuk memahami dari sisi psikologi seorang pemimpin negara ketika menghadapi suatu masalah dan hasil yang akan dimunculkan dari faktor-faktor kepribadian yang melekat pada diri seseorang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap isu mengenai perilaku pemimpin dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan dapat berguna dan menjadi acuan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penulis lain yang ingin membahas tentang idiosinkratik dan laut Natuna. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang ingin diketahui oleh pembaca sehingga akan menambah wawasan pembaca. Tidak hanya itu, penelitian juga diharapkan mampu melengkapi penelitian-penelitian lainnya yang membahas tentang isu serupa.

1.4. Kajian Literatur

Selama penelitian berlangsung, data-data yang dikumpulkan tidak terlepas dari literatur dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dengan demikian,

penulis akan melakukan kajian terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas di dalam penelitian. Setiap literatur memiliki perspektif masing-masing dalam melihat isu yang serupa sehingga peneliti akan mengkaji literatur-literatur tersebut dan mencari ide utama dari masing-masing literatur.

Dalam tulisan berjudul *“Pengaruh Idiosinkratik Shinzo Abe terhadap Upaya Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang dari Pasifisme Idealis menjadi Pasifisme Proaktif”* karya Dinda Arumsari membahas tentang perubahan kebijakan luar negeri suatu negara disebabkan oleh kepribadian dari seorang pemimpin. Pada masa kepemimpinan Shinzo Abe, adanya dobrakan kebijakan luar negeri yang berbeda dari pemimpin-pemimpin Jepang di periode sebelumnya. Shinzo Abe adalah sosok dengan kepribadian yang berambisi besar dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Hal ini yang menyebabkan Shinzo Abe memutuskan untuk mengadopsi kebijakan yang lebih agresif dan menyebabkan adanya perubahan kebijakan luar negeri Jepang dari pasifisme idealis menjadi pasifisme proaktif. Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan pada kepribadian dari Shinzo Abe memainkan peranan yang penting di dalam perubahan kebijakan luar negeri Jepang.²⁶

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh literatur pertama, literatur selanjutnya yang berjudul *“Pengaruh Kepribadian Jokowi dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Studi Kasus Pelanggaran Cina di Natuna”* karya Tomy Putra dan Mohamad Rosyidin membahas tentang kepribadian dari pemimpin negara

²⁶ Dinda Arumsari, “Pengaruh Idiosinkratik Shinzo Abe Terhadap Upaya Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang dari Pasifisme Idealis Menjadi Pasifisme Proaktif,” *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 7, no. 3 (2018): 59-69, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi73b2516703full.pdf>.

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang kemudian menyebabkan adanya perubahan dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Literatur ini menekankan pada kepribadian dari Presiden Joko Widodo yang mempengaruhi cara pandangnya dan pendekatannya terhadap isu-isu politik di Indonesia. Adanya kepribadian dari Joko Widodo yang tegas dan pragmatis mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani konflik maritim dengan Tiongkok di Laut Natuna.²⁷

Dengan ide utama yang sama, literatur selanjutnya yang berjudul *“Balancing with Jokowi’s Characteristics: A Neoclassical Realism Approach to Indonesia’s Foreign and Security Policies in the South China Sea”* karya Muhammad Arif membahas tentang karakteristik dari suatu pemimpin negara mempengaruhi keputusan kebijakan luar negerinya. Dalam hal ini, karakteristik dari Presiden Joko Widodo, seperti latar belakang politiknya dan keyakinan nasionalisnya mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia ketika menghadapi konflik di Laut Tiongkok Selatan. Latar belakang Joko Widodo yang bersifat lokal, berfokus pada isu-isu domestik, serta keyakinan nasionalisnya yang kuat tentang pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah negara menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia di Laut Natuna.²⁸

Pendapat yang berbeda dimunculkan oleh literatur yang berjudul *“Indonesia’s Responses toward the South China Sea Dispute during Joko Widodo’s*

²⁷ Tomy Putra D. dan Mohamad Rosyidin, "Pengaruh Kepribadian Presiden Jokowi dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Cina di Natuna," *Journal of International Relations* 5, no. 2 (2019): 323-331, <https://doi.org/10.14710/jirud.v5i2.23627>.

²⁸ Muhammad Arif, *Balancing with Jokowi’s Characteristics: A Neoclassical Realism Approach to Indonesia’s Foreign and Security Policies in the South China Sea*, *Journal of Asian Security and International Affairs* 8, no.3 (2021): 370–390. <https://doi.org/10.1177/23477970211041455>.

Administration” karya Yuli, Andhini, dan Marina. Literatur tersebut membahas tentang kepentingan negara sebagai aspek yang mendasari suatu kebijakan luar negeri. Dalam literatur ini dijelaskan bahwa adanya kepentingan Indonesia yang menyebabkan Indonesia pada akhirnya mengambil langkah tegas dalam menyikapi konflik di Laut Natuna. Hal ini bermula dari Tiongkok yang menciptakan *Nine Dash Line* dan melakukan klaim terhadap Laut Tiongkok Selatan. Namun klaim tersebut ditolak karena tidak memiliki landasan hukum yang sah. Hal ini menunjukkan kepentingan negara dalam menjaga kedaulatan sehingga kepentingan tersebut yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia.²⁹

Sejalan dengan pendapat literatur sebelumnya, literatur yang berjudul “*The Indonesia-China Relations in the Natuna Sea Dispute Resolution: Struggle for Sovereignty*” karya Andrias Darmayadi dan Ervina Nabilah Purnamasari membahas tentang kepentingan negara sebagai faktor yang menyebabkan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia di Laut Natuna. Dalam literatur tersebut dijelaskan bahwa adanya peraturan dari Tiongkok, yaitu *Nine Dash Line* yang menjadi alasan Tiongkok memiliki kewenangan untuk bebas berlayar di perairan Laut Natuna. Hal ini mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia dimana klaim yang dilakukan Indonesia merugikan Indonesia, yaitu Indonesia harus kehilangan perairan sekitar 83.000 km persegi atau sekitar 20 persen dari luar laut Indonesia di Natuna. Maka dari itu, adanya kepentingan Indonesia, yaitu Indonesia ingin mengambil kembali hak wilayahnya dengan meningkatkan pertahanan di Laut

²⁹ Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, dan Marina Ika Sari, “Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute during Joko Widodo’s Administration,” *Dinamika Masalah Politik dalam Negeri & Hubungan Internasional (POLITICA)* 12, no.1 (2021): 84-101, 10.22212/jp.v12i1.2149.

Natuna yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri Indonesia di Laut Natuna.³⁰

Melalui kajian yang telah dilakukan, penulis hendak menyampaikan perdebatan yang muncul dari kelima literatur diatas. Perdebatan tersebut terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok yang membahas tentang kepribadian dari presiden atau pemimpin negara sebagai faktor yang menentukan kebijakan luar negeri. Sedangkan pada kelompok kedua adalah kelompok yang membahas tentang kepentingan negara sebagai aspek yang mendasari suatu kebijakan luar negeri. Dapat terlihat dalam literatur pertama, kedua, dan ketiga memiliki perspektif yang sama yaitu mendukung bahwa kepribadian pemimpin negara sebagai faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Pada literatur keempat dan kelima mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kepentingan negara sebagai faktor yang berimplikasi terhadap pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara.

Penulis mendukung pendapat kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa kepribadian dari presiden berimplikasi terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Maka dari itu, penulis melakukan studi tentang identifikasi faktor-faktor idiosinkratik Joko Widodo dalam kebijakan luar negeri Indonesia dengan menggunakan studi kasus pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna. Penelitian tersebut akan dianalisis dengan menggunakan *The Big Five Personality Traits*

³⁰ Andrias Darmayadi dan Eryina Nabilah Purnamasari, "The Indonesia – China Relations in the Natuna Sea Dispute Resolution: Struggle for Sovereignty," *Journal of Eastern European and Central Asian Research* 9 (1): 41-48, <https://doi.org/10.15549/jeeecar.v9i1.870>, <https://www.proquest.com/scholarly-journals/indonesia-china-relations-natuna-sea-dispute/docview/2634087966/se-2>.

dimana hal ini yang menjadi kebaruan yang tidak ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, peneliti akan memulai kerangka penelitian dengan menjelaskan terlebih dahulu definisi Hubungan Internasional dan kaitannya dengan aktor individu. Setelah itu, peneliti akan berfokus pada pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kepribadian dari suatu individu dan teori *The Big Five Personality Traits* sebagai alat yang digunakan untuk menjelaskan kepribadian individu tersebut.

Hubungan Internasional adalah studi yang mempelajari tentang hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dan adanya fenomena yang dihasilkan dalam ruang lingkup internasional. Fenomena yang terjadi berhubungan dengan para aktor, dimana aktor-aktor tersebut yang akan mempengaruhi dinamika hubungan internasional. Pada awalnya, aktor yang diakui di dalam hubungan internasional hanya berupa negara. Namun seiring dengan perkembangan zaman, aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional sampai aktor individu juga memegang peranan penting dalam setiap fenomena yang terjadi.

Fenomena yang muncul dalam hubungan internasional terjadi dalam berbagai kondisi, baik fenomena yang bersifat positif, seperti adanya kerjasama yang terjadi antara dua negara maupun fenomena negatif, seperti terjadinya peperangan yang menghancurkan keadaan di suatu negara. Agar menghindari fenomena-fenomena negatif yang merugikan banyak orang, maka adanya batasan-

batasan dan serangkaian aturan yang dibentuk agar terciptanya harmonisasi antar negara di dunia. Aturan tersebut dimuat di dalam kebijakan luar negeri suatu negara yang akan digunakan sebagai pedoman suatu negara dalam mengambil keputusan.

Setiap negara memiliki kebijakan luar negeri dimana hal ini digunakan untuk mengatur hubungan antara negaranya sendiri dengan negara lain di dalam lingkup internasional. Kebijakan luar negeri yang dihasilkan oleh negara melewati suatu proses formulasi kebijakan dan pada proses tersebut adanya aktor non-negara, seperti aktor individu yang berperan penting di dalam pengambilan keputusan. Menurut Valerie Hudson, fenomena yang terjadi antara lintas batas negara ditentukan oleh sikap dari para pengambil keputusan. Hal ini terbagi menjadi tiga level analisis, yaitu sistem internasional, negara, dan individu. Pada level analisis, yaitu sistem internasional berfokus pada posisi negara di dalam sistem internasional yang menjadi penentu pengambilan suatu keputusan. Dalam level analisis, yaitu negara berfokus pada perilaku dari suatu negara yang berdampak terhadap hubungan antar negara dan sebagai penentu dibentuknya suatu keputusan. Pada level analisis, yaitu individu berfokus pada pemimpin dari suatu negara atau presiden yang menjadi penentu dari terbentuknya suatu keputusan.³¹

Keputusan yang ditetapkan oleh suatu individu dipengaruhi oleh kepribadian individu tersebut sehingga kepribadian dari suatu pemimpin politik dapat berdampak dalam penentuan kebijakan luar negeri. Menurut Hall & Lindzey kepribadian dapat diartikan sebagai pola perilaku yang dihasilkan secara berulang-

³¹ Valerie M. Hudson "Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations." *Foreign Policy Analysis* 1, no. 1 (2005): 1-30. <http://www.jstor.org/stable/24907278>.

ulang dan mencakup aspek pemikiran, perasaan, dan tindakan. Mereka juga menekankan adanya sikap yang muncul secara konsisten ketika dihadapkan pada suatu hal serta kepribadian dari seseorang dapat mengatur perilaku dari seseorang.³²

Pendapat lainnya dari Derlaga, Winstead, & Jones menyatakan bahwa kepribadian adalah serangkaian karakteristik dari individu dan karakteristik tersebut yang akan mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan perilaku yang dihasilkan seseorang. Karakteristik yang dimiliki juga akan mempengaruhi interaksi antara seseorang dengan yang lainnya dalam berbagai situasi. Mereka juga menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik dari seseorang seperti faktor genetika, lingkungan, dan pengalaman hidup dimana faktor tersebut dapat berubah dan berkembang sepanjang hidup suatu individu.

Selanjutnya pendapat dari J. Feist dan G.J. Feist yang mengatakan bahwa kepribadian adalah sekumpulan karakteristik dari individu yang sifatnya cenderung stabil. Karakteristik tersebut yang akan menentukan bagaimana individu berpikir, merasa, dan bertindak. Mereka juga mengatakan bahwa kepribadian adalah konsep yang berkaitan erat dengan aspek perilaku, motivasi, persepsi, dan interaksi sosial. Adapun pendapat lainnya menurut McCrae yang menyatakan bahwa kepribadian adalah karakteristik yang menempel pada diri manusia dan menggambarkan perilaku suatu individu ketika sedang bertindak dan berinteraksi.³³

³² Hall dan Lindzey, "Theories of personality (4th ed.)," *John Wiley & Sons Inc*, (1998) <https://psycnet.apa.org/record/1998-06741-000>.

³³ G.J. Feist, *The Psychology of Science and the Origins of the Scientific Mind*, Yale University Press, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=SIFwaW82VngC&oi=fnd&pg=PR7&dq=J.Feist+dan+G.J+Feist+psychology&ots=CNYGPYWQRS&sig=ocvuAVPkNugYzint-yD9WuvqcQI&redir_esc=y#v=onepage&q=J.Feist%20dan%20G.J.%20Feist%20psychology&f=false.

McCrae juga menyatakan dalam mengidentifikasi faktor psikologis dan kognitif dari seorang pemimpin negara dapat digunakan model *The Big Five Personality Traits*. *The Big Five Personality Traits* adalah model pendekatan yang digunakan sebagai alat untuk menilai kepribadian dari seorang pemimpin politik dimana kepribadian dari pemimpin tersebut yang akan memberikan dampak terhadap pengambilan keputusan.³⁴

Teori ini terdiri dari 5 dimensi kepribadian, yaitu *extraversion*, *agreeableness*, *openness to experience*, *neuroticism*, dan *conscientiousness*. Dimensi kepribadian yang pertama, yaitu *extraversion* merupakan dimensi kepribadian yang sering dikaitkan dengan energi yang dimiliki seseorang ketika bersosialisasi. Orang dengan nilai *extraversion* yang tinggi akan memiliki sifat yang periang, ramah, memiliki banyak topik pembicaraan, menyenangkan, antusias, komunikatif, serta mudah membangun koneksi dan hubungan dengan orang lain. Kebalikannya, orang dengan nilai *extraversion* yang rendah akan cenderung bersifat penyendiri, pendiam, dan lebih menyukai suasana tanpa harus melibatkan orang yang banyak.³⁵

Dimensi kepribadian yang kedua, yaitu *neuroticism* adalah dimensi kepribadian yang menekankan fokusnya pada tingkat emosi dari seseorang. *Neuroticism* seringkali disebut sebagai kebalikan dari *extraversion*, jika *extraversion* adalah orang dengan semangat yang menggebu-gebu, *neuroticism* adalah orang yang memiliki emosi negatif yang tinggi. Emosi negatif adalah

³⁴ Martha Cottam dkk, *Introduction to Political Psychology* (London: Lawrence Erlbaum Associates, 2004, hal 3.

³⁵ *Ibid.*

kondisi dimana seseorang memiliki perasaan tertekan ketika melihat dirinya sendiri dan sekitarnya. Orang dengan tingkat *neuroticism* tinggi akan cenderung mudah marah, memiliki rasa cemas yang tinggi, suka mengasihani diri sendiri, dan rentan terkena *stress*. Sebaliknya orang dengan tingkat *neuroticism* yang rendah akan memiliki sifat yang tenang, mampu mengontrol emosi, dan menguasai diri.³⁶

Dimensi kepribadian yang ketiga, yaitu *agreeableness* adalah dimensi kepribadian yang menunjukkan tingkat kerukunan antara dirinya dengan orang lain. Orang dengan tingkat *agreeableness* yang tinggi akan cenderung mengalah untuk menghindari konflik, memiliki sifat kooperatif yang tinggi, murah hati, dan peduli dengan lingkungan sekitar. Selain itu, orang dengan tingkat *agreeableness* yang tinggi juga memiliki sifat yang mudah percaya dengan orang lain dan memiliki toleransi yang tinggi. Sebaliknya orang dengan tingkat *agreeableness* yang rendah cenderung akan memiliki sifat yang kritis dan sering menaruh kecurigaan kepada orang lain. Jika dihubungkan dengan dunia perpolitikan, *agreeableness* dapat dilihat sebagai seberapa tinggi tingkat kooperatif seorang aktor politik ketika menghadapi suatu masalah.³⁷

Dimensi kepribadian yang keempat, yaitu *conscientiousness* adalah dimensi yang berfokus pada sifat yang menunjukkan sejauh mana seseorang konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai. Orang dengan tingkat *conscientiousness* yang tinggi akan memiliki sifat yang bertanggung jawab, pekerja keras, tepat waktu, berhati-hati, teratur, teliti, dan tekun. Sebaliknya orang dengan tingkat

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

conscientiousness yang rendah akan memiliki sifat yang mudah menyerah, bermalas-malasan, dan tidak memiliki tingkat semangat yang tinggi.³⁸

Dimensi kepribadian yang kelima, yaitu *openness to experience* adalah dimensi yang berfokus pada sifat seseorang dalam ketersediaan diri menerima pengalaman yang berbeda di dalam hidup atau adanya sifat terbuka kepada pengalaman. Orang yang terbuka pada pengalaman akan memiliki jiwa yang kreatif, artistik, imajinatif, dan menyenangkan. Sebaliknya orang dengan tingkat *openness to experience* yang rendah akan memiliki sifat yang konvensional dan konservatif.³⁹

Selanjutnya, kelima dimensi kepribadian tersebut akan diukur dengan *the big five locator questionnaire*. Dalam *the big five locator questionnaire*, sifat manusia akan dihitung dan perhitungan tersebut akan menunjukkan kepribadian dari seseorang apakah orang tersebut akan memiliki sifat *resilient, responsive, reactive, introvert, ambivert, atau extrovert*.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Penulis menggunakan *qualitatively driven approaches*, yaitu studi kualitatif yang didukung dengan metode kuantitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang bersifat deskriptif atau metode yang

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

memberikan penjelasan mengenai suatu isu tertentu melalui analisis. Fokus dari metode kualitatif adalah pada pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena dan di dalam fenomena tersebut dilakukannya interpretasi atau penemuan makna.⁴⁰

Studi kasus juga digunakan di dalam penelitian, dimana studi kasus adalah metode yang menekankan pada pemahaman mengenai suatu fenomena kemudian fenomena tersebut akan didalami atau dikaji dengan perhitungan yang ada di dalam kuesioner (lihat lampiran 1,2,3,4). Penulis menggunakan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif karena pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan tulisan pada faktor-faktor idiosinkratik dari Joko Widodo dengan menggunakan studi kasus pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna serta faktor-faktor idiosinkratik tersebut akan dibuktikan melalui perhitungan yang ada. Data kuantitatif akan digunakan sebagai data pendukung di dalam penelitian, dimana akan digunakan untuk mengukur dan menemukan kepribadian dari Joko Widodo.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data, peneliti akan menggunakan pengambilan data berbasis dokumen. Dokumen yang akan digunakan di dalam penelitian adalah dokumen primer dan sekunder. Dokumen primer merupakan dokumen asli atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok

⁴⁰ Umar Suryadi, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 170.

bisnis.⁴¹ Dokumen sekunder merupakan dokumen primer yang telah melewati melewati proses edit.⁴²

Peneliti menggunakan sumber data primer, seperti melihat dokumen pernyataan resmi mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Sedangkan pada dokumen sekunder, peneliti menggunakan artikel elektronik, buku-buku, berita online, jurnal dan data kepastakaan lainnya untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kasus. Penulis juga akan menggunakan teknik perhitungan kepribadian melalui kuesioner yang telah disediakan. Data-data yang dikumpulkan akan dikaji ulang dengan menggunakan teknik triangulasi data. Penulis akan menemukan data-data yang berbeda tetapi saling beririsan kemudian akan menarik garis merah dari data-data yang telah didapatkan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian berjudul “Identifikasi Faktor-Faktor Idiosinkratik Joko Widodo dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kasus Pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna Utara (2016-2022)”, peneliti akan membagi penelitian ke dalam empat bagian. Pada bab I, penulis akan membahas tentang latar belakang masalah, yaitu dimulai dari menjelaskan salah satu faktor yang berimplikasi pada suatu pengambilan keputusan adalah pemimpin di suatu negara. Kemudian dilanjutkan dengan fenomena-fenomena dari berbagai pemimpin di dunia, seperti Donald

⁴¹ Ibid, 171.

⁴² Ibid, 171.

Trump dan George W. Bush yang menunjukkan kepribadian dari pemimpin yang memegang peranan dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya dijelaskan sejarah laut Natuna dan keterlibatan Tiongkok di dalamnya. Penulis juga menjelaskan secara singkat hubungan antara Tiongkok dan Indonesia serta keputusan Joko Widodo dan pelanggaran ZEE Indonesia yang dilakukan pihak Tiongkok. Setelah latar belakang, penulis mengidentifikasi masalah yang terdapat di dalam kasus yang dibahas. Penulis membahas tentang Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, tetapi Indonesia tetap mengambil langkah tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Tiongkok di Laut Natuna. Selain itu, peneliti akan melakukan deskripsi masalah, pembatasan masalah, merumuskan masalah, dan menuliskan tujuan serta kegunaan penelitian.

Kemudian peneliti melakukan kajian pustaka dari berbagai jurnal artikel untuk mendukung data-data penelitian, menjelaskan kerangka alur berpikir untuk memudahkan pembaca, dan membahas tentang teori *The Big Five Personality Traits* sebagai teori yang akan dipakai di dalam penelitian. Penulis juga menjelaskan metode penelitian yang dipakai, yaitu metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Setelah itu pada bagian akhir bab I, peneliti membahas tentang sistematika penulisan yang akan dilakukan di dalam penelitian.

Pada bab II, penulis akan membahas tentang kondisi konflik di Laut Tiongkok Selatan dan biografi dari Joko Widodo sebagai pemimpin di Indonesia. Penulis akan menjabarkan sejarah konflik Laut Tiongkok Selatan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tiongkok di Laut Natuna, serta keterlibatan ASEAN

di dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Setelah itu, penulis akan mendeskripsikan profil dari Joko Widodo. Kemudian penulis akan membahas kebijakan luar negeri Indonesia di Laut Natuna sebagai respons dari pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna dan menjabarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Indonesia atas Laut Natuna pada tahun 2016-2022.

Pada bab III, penulis akan melakukan identifikasi terhadap kepribadian dari Joko Widodo menggunakan indikator dari teori *The Big Five Personality Traits* dan *the big five locator questionnaire*. Setelah itu, penulis akan menghubungkan idiosinkratik dari Joko Widodo dengan kebijakan luar negeri di Laut Natuna menggunakan *The Big Five Personality Traits* serta *the big five locator questionnaire*.

Selanjutnya pada bab IV, penulis akan memberikan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian. Kesimpulan tersebut akan memuat rangkuman atas rumusan masalah, yaitu “Bagaimana faktor-faktor idiosinkratik Joko Widodo berimplikasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia di Laut Natuna?”